Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume 2, Nomor 3, Agustus 2025
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 296-316
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1318
Available Online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi *Environmental Social Governance Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak

Muhammad Rizal Afandi[1*], Suwandi[2]
[1,2]Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

**Korespondensi penulis: mrizalafandi34@gmail.com*

Abstract. *The purpose study aims to analize the effect of the environmental social governance & tax agresivity with Role political connection as moderation variable. In this study the theory used as the basis for this test is Legistimachy theory & Political Cost Hypotesis theory, This study aims to examine the environmental, social and governance aspects of tax aggressiveness and to examine whether political connections can moderate environmental social governance on tax aggressiveness in manufacturing, mining, & agro companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).. Sample measurements in this research were using quantitative techniques. The objects used as samples in this test were 60 companies The type of data used as the research object is documentary, namely financial reports of companies by selecting the time period 2021 to 2023 respectively. This research uses outer model, inner model & hypothesis testing. The results show that each dimension of the environment social and governance does not have a direct effect on tax aggressiveness with a significance value of p value above 0.05 and t statistic shows a coefficient below 1.966. However, the indirect effect shows that political connections can act as a negative moderator of the relationship between the environment and tax aggressiveness with a significance value of p value 0.020 and t statistic 2.330. In addition, political connections can also act as a positive moderator of the relationship between governance and tax aggressiveness with a significance value of p value 0.004 and t statistic 2.906. However, political connections cannot moderate the relationship between the social environment and tax aggressiveness with a significance value of p value e 0.081 and t statistic 1.745.*

Keywords: *Environmental Social Governance, Manufacturing Companies, Moderation, Political Connections, Tax Aggressiveness.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG) dan agresivitas pajak dengan peran koneksi politik sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah *Legitimacy Theory* dan *Political Cost Hypothesis Theory*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap agresivitas pajak serta menguji apakah koneksi politik dapat memoderasi hubungan antara *Environmental Social Governance* dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, pertambangan, dan agro yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Objek yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan. Jenis data yang digunakan sebagai objek penelitian adalah data dokumenter, yaitu laporan keuangan perusahaan dengan periode waktu yang dipilih dari tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi dari lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak memiliki pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi (*p-value*) di atas 0,05 dan statistik *t* menunjukkan koefisien di bawah 1,966. Namun, pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa koneksi politik dapat bertindak sebagai moderator negatif dalam hubungan antara lingkungan dan agresivitas pajak dengan nilai signifikansi *p-value* 0,020 dan statistik *t* 2,330. Selain itu, koneksi politik juga dapat bertindak sebagai moderator positif dalam hubungan antara tata kelola dan agresivitas pajak dengan nilai signifikansi *p-value* 0,004 dan statistik *t* 2,906. Namun, koneksi politik tidak dapat memoderasi hubungan antara lingkungan sosial dan agresivitas pajak dengan nilai signifikansi *p-value* 0,081 dan statistik *t* 1,745.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, *Environmental Social Governance*, Koneksi Politik, Moderasi, Perusahaan Manufaktur.

Received Juni 03, 2025; Revised Juni 20, 2025; Accepted Juli 06, 2025; Online Available Juli 09, 2025

1. PENDAHULUAN

Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakan berdampak tingginya penerimaan anggaran yang diatur oleh negara untuk kemerataan pembangunan. Namun, secara aktual hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan. Pengalihan biaya oleh perusahaan untuk kepentingan operasional menjadi dugaan pemicu adanya agresivitas pajak (Fadillah & Lingga, 2021). Langkah ini memberikan banyak peluang oleh perusahaan baik berupa kebermanfaatan maupun ancaman.

Penekanan biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi langkah strategis untuk optimalisasi setiap operasonal perusahaan. Salah satunya yaitu manipulasi terhadap kewajiban pembayaran pajak di Indonesia dengan memanfaatkan perhitungan secara mandiri (Widuri et al., 2024). Hal ini difungsikan untuk pengalihan biaya yang dikeluarkan untuk kemajuan langkah pengembangan investasi, peningkatan arus kas, dan sebagai strategi globalisasi untuk mampu bersaing dalam perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif.

Menurut data mutakhir pertumbuhan kontribusi sumber pendanaan untuk pembangunan dari perpajakan mengalami perlambatan penerimaan pada tahun 2024. Kejadian diawali dengan pertumbuhan penerimaan pajak negara yang yang hanya tumbuh 9,9% (yoy) sampai periode Januari-Juni 2023. Padahal, pada Januari 2023 masih terjadi peningkatan pertumbuhan 4,87% secara tahunan (Annur, 2023).

Rasio penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu penerimaan terendah dari negara ASEAN. pada tahun 2023 rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,21 persen, selisih dari 2022 sebesar 10,39 persen lebih rendah (Theodora, 2024). Peristiwa ini menimbulkan konotasi adanya pelanggaran pembayaran perpajakan.

Penghindaran pajak menjadi mobilitas perusahaan yang direncanakan untuk kepentingan mempersempit kewajibannya (Sadjiarto et al., 2024). Perencanaan yang strategis diberlakukan supaya perusahaan tidak secara masif dalam mengeluarkan biaya (Carolina & Tjahyadi, 2024). Berbagai paradigma menyiratkan bahwa pajak menurunkan perekonomian kapasitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan berusaha menghindari beban pembiayaan pajaknya. Terkadang, perusahaan melakukan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum dalam pencapaiannya.

Perhitungan CETR (*Cash Effective Rate*) menjadi formula dalam menentukan tingkat kredibilitas perusahaan dalam pemenuhun kewajiban pembayaran pajaknya. CETR mampu memberikan interpretasi riil kas yang dikeluarkan perusahaan untuk pembiayaan perpajakan yang diperoleh dari laporan arus kas. Dibandingkan dengan pemakaian ETR (*Effective Tax Rate)* dalam menentukan seberapa besar tingkat penghindaran pajak, formulasi CETR lebih

komprehensif dalam menentukan seberapa signifikan perusahaan melakukan tindakan pengurangan pajak secara aktual yang dibayarakan secara tunai dibandingkan ETR (*Effective Tax Rate)* yang terdistorsi oleh pajak tangguhan (Dyreng et al., 2019). Semakin rendah CETR yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa terdapat dugaan pelanggaran perpajakan.

Secara empiris, strategi pengelolaan pembayaran pajak seringkali menabrak norma yang berlaku (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024). Siasat dalam melakukan agresivitas pajak ini memainkan peran internal perusahaan dalam memanfaatkan setiap pasal peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mencari setiap sudut celah untuk mengurangi kewajiban atau beban tanggungan perpajakan suatu entitas bisnis. Perlakuan agresif dengan pengurangan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia (Ridwansyah & Indayani, 2024).

Tindakan *agresivitas* merupakan proses menyusutkan kewajiban dalam pembayaran perpajakan oleh perusahaan. Konsentrasi ini perlu disadari oleh pihak pemerintah agar strategi untuk pembangunan negara bisa efisien dengan adanya penerimaan pajak yang sesuai target anggaran. Penyelewengan yang bersifat sintesis ini dipicu oleh lemahnya kesadaran dalam internal di perusahaan risiko terlalu mengejar profit menerobos norma perpajakan (Aulia & Alvia, 2024). Jadi, Perlakuan tidak etis diperbuat oleh internal ekuivalen dengan risiko besar yang menyelimuti perusahaan.

Environmental social governance (ESG) merupakan skema yang dijadikan patokan untuk mengendalikan arah gerak perusahaan dengan mengerucut pada tiga tiga dimensi utama dalam mengukur keberlanjutan pada suatu perusahaan (Faradita & Kurniawan, 2024).. Secara fundamental, perusahaan memiliki hasrat mencapai titik keberlangsungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Keterlibatan perusahaan dalam implementasi strategi yang mementingkan situasi lingkungan, sosial dan tata kelola atau diluar pengelolaan kinerja keuangan adalah output ESG. Orientasi ini dicapai untuk operasional perusahaan bisa optimal dan efektif dalam pencapaian nilai di mata eksternal meningkat (Kartika et al., 2023). Namun, kepentingan ini diperlukannya keseimbangan antara pengelolaan perusahaan yang benar. Dengan demikian, legistimasi dari masyarakat akan meningkat. Kepercayaan ini mampu menarik peran *stakeholder* dalam membantu kepentingan perusahaan.

Kerangka kerja yang mementingkan ESG didalamnya memiliki reaksi positif terhadap penghindaran pembayaran pajak secara agresif dengan melihat dari perhitungan CSR yang merupakan bagian dari ESG, meskipun pengaruhnya bervariasi dari dimensi penyusunnya (Anggraeni & Palupi, 2023). Namun, penelitian lain mengatakan bahwa ESG memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak (Agustini et al., 2023).

Penelitan lain juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara skor ESG dengan agresivitas pajak (Yoon et al., 2021).

Salah satu desain dalam pengaplikasian agresivitas pajak sebagai upaya pencegahan pembekakan biaya perpajakan yakni memainkan koneksi politik perusahaan untuk mendapatkan kebermanfaatan dalam memperoleh informasi lebih banyak mengenai aturan perpajakan yang dimanfaatkan dalam upaya agresivitas pajak (Asmara & Helmy, 2023). Terlebih lagi dinamika muncul di sistem multipartai yang dianut Indonesia, banyak politisi juga berperan di perusahaan (Erdayosi et al., 2019). Secara pretensi koneksi politik yang dimiliki wajib pajak memberikan perlakuan yang lebih diprioritaskan seperti penerimaan konsekuensi akibat kesalahan strategi dalam pemeriksaan pajak dan pengelolaan liquiditas (Carolina & Tjahyadi, 2024). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki fasilitas koneksi politik bagi perusahaan mempunyai kelebihan baik dari sisi investasi maupun perpajakan (Solikin & Slamet, 2022). Dalam penelitian ini menghadirkan peran jaringan politik dalam mendorong tingkat keterkaitan variabel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Legitimasi*

Teori yang melandasi penelitian ini yaitu teori *legitimasi* yang mengartikan bentuk korporasi antara internal perusahaan dengan masyarakat atau selalu mem-erhatikan kegiatan operasional agar tidak menyimpang dari norma sosial daerah tempatnya (Shafanur & Ratnasari, 2023). Hal ini diharapkan perusahaan mampu untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dengan peran *legitimasi* oleh masyarakat. Dalam pengertian ini relavan dengan aspek kontribusi strategi perusahaan dalam bentuk ESG yakni bertanggung jawab untuk mengutamakan keberpihakan atau kepentingan kepada masyarakat selaku pelaku sosial. Jadi, keberadaan perusahaan beroprasi berlandaskan kepentingan norma sosialitas sebagai tanggung jawab keberadaan perusahaan atas lingkungan.

Teori *Political Cost Hipothesis*

Teori political cost hypothesis menjadi landasan korelasi antar variabel. Teori ini memberikan pengungkapan bahwa pemilihan strategi khusus yang diterapkan untuk mengantisipasi dampak biaya politik yang tinggi akibat keuntungan yang besar (Ferdiawan & Firmansyah, 2020). Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki memiliki cakupan yang luas atas operasionalnya cenderung lebih memilih untuk menghindari biaya politik yang tinggi guna optimalisasi pengembangan perusahaan. Secara keseluruhan, teori *cost hypotesis*

memberikan navigasi dalam pengelolaan biaya kewajiban perpajakan melalui adaptasi dengan lingkungan politik dan regulasi sebagai optimalisasi keuntungan dan meminimalkan kewajiban permbayaran pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan upaya pengendalian kewajiban pembayaran perpajakan melalui perencanaan pajak baik dengan metode yang secara legal (tax avoidance) ataupun dengan penggelapan pajak (tax evasion). Perusahaan dituntut dan diwajibkan dalam membayar perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyataannya kewajiban ini bertentangan dengan keinginan pihak internal perusahaan dalam mengelola bisnis perusahaan yang mengedepankan profit dan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan segala arah beban usaha yang menghambat pertumbuhan keuntungan perusahaan. Terlebih perusahaan yang memiliki *income* atas operasionalnya dengan kadar yang tinggi yang berakibat pada tingginya kewajiban untuk pembayaran pajak.

***Environmental, Social, and Governance* (ESG)**

Suatu entitas bisnis yang memperhatikan setiap langkahnya agar tidak merusak kondisi lingkungan cenderung lebih berhati hati dalam menghindari pajak karena dapat menurunkan nama perusahaanya di mata eksternal dan mengakibatkan pengenaan hukum akibat penghindaran pajak yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan (Anggraeni & Palupi, 2023). Relevansi global semakin manajam dengan pengelolaan perusahaan yang mengedepankan kepentingan keberlanjutan dengan penerapan ESG. Disamping itu, pergerakan operasional bisnis juga memerlukan pembentukan budaya perusahaan sebagai bentuk landasan kultural sebagai pembangunan tata kelola yang membentuk norma perilaku sehingga mampu membangun reputasi yang baik, loyalitas pelanggan, dan pengurangan risiko hukum (Farhan, 2024).

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah ambisi perolehan keuntungan yang didapatkan melalui ikatan jaringan dengan pihak yang mempungai latar belakang politik. kemudahan akan lebih tercapai kepada entitas bisnis dalam aspek perlakuan untuk memperoleh risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Asmara & Helmy, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu agresivitas pajak sedangkan variabel bebasnya yaitu *environmental social governance*. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa dokumenter yakni laporan tahunan dan keberlanjutan yang sudah diterbitkan oleh masing masing perusahaan pada tahun 2021 - 2023. Informasi ini dapat diperoleh melalui *website* resmi BEI (www.idx.co.id) dan *website* resmi masing masing perusahaan. Metode pengambilan sampel oleh peneliti menggunakan *purposive sampling*. Dalam perhitungan variabel penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan menggunakan aplikasi SmartSPSS statistik untuk menghitung hubungan antar variabel peneliti. Analisis yang dipakai yaitu *outer model, inner Model* & uji hipotesis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji total ESG

Pada pengujian ini variabel *environmental social governance* dirangkai menjadi satu variabel dengan tiga dimensi penyusunnya. Selanjutnya, peneliti memanfaatkan alat analisis smartPLS untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikut disajikan hasil korelasi yang diperoleh dari analisis tersebut.

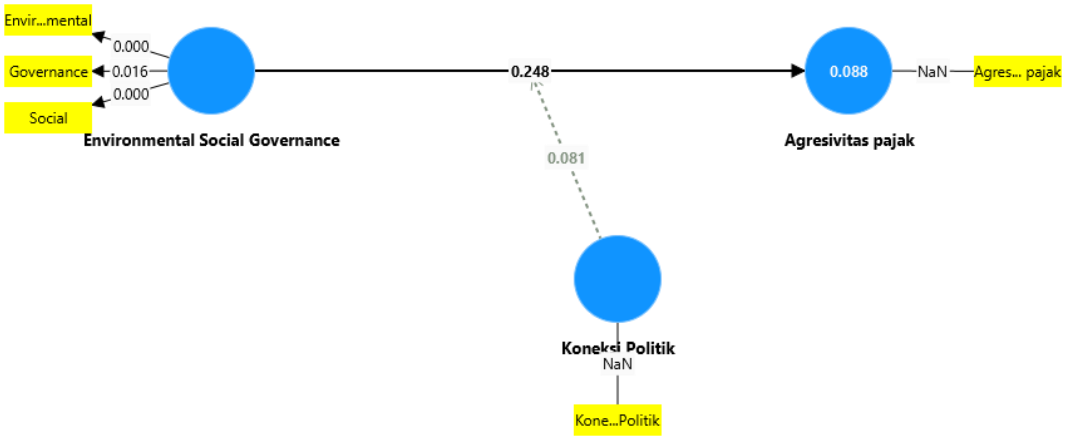

Gambar 1. Hasil Output Smart pls

1) Evaluation Of Measrement Model test or Outer Model

a. Validitas konvergent *(outer loading)*

Tabel 1. *Outer Loading*

	AP	ESG	KP	KP x ESG	Keterangan
Agresivitas Pajak	1000				Valid
Environmental		0,65			Valid
Governance		0,38			Tidak Valid
Koneksi Politik			1,000		Valid
Social		0,62			Valid
Koneksi Politik x Environmental Social Governance				1,000	Valid

Sumber: Hasil Outer Loading Output SmartPLS

Dari hasil pengujian *Comvergent Validity* peneliti menemukan bahwa Agresivitas Pajak memberikan hasil 1,000 yang berarti masih dapat diterima karena perhitungan menggunakan satu indikator saja. *Environmental* yang diukur melalui perhitungan GRI standar 300 memberikan hasil 0,65 berarti bahwa masih dapat diterima sebagai variabel penelitian. *Social* yang diukur melalui perhitungan GRI standar 400 memberikan hasil 0,62 berarti bahwa masih dapat diterima sebagai variabel penelitian. *Governace* yang yang diukur melalui perhitungan GRI standar 200 memberikan hasil 0,38 berarti bahwa tidak dapat diterima sebagai variabel penelitian. Koneksi politik memiliki hasil uji sebesar 1000 yang berati variabel yang dapat diterima karena perhitungan menggunakan satu indikator saja. Koneksi politik sebagai variabel moderasi memiliki hasil uji sebesar 1000 yang berarti variabel dapat diterima karena perhitungan menggunakan satu indikator saja (Hair et al., 2017).

b. Diskriminan validity

Tabel 2. *Diskriminan Validity*

	AP	*ESG*	KP	KP x ESG
AP				
ESG	0.057			
KP	0.027	0,27		
KP x ESG	0,18	0,43	0,17	

Sumber: *Discriminan Validity Output SmartPLS*

c. *Average Variant Extracted* (AVE)

Tabel 3. Construk *Reability* dan *Validity*

	cro nbach's alpha	composite reability (rho_a)	Composite Reabiility rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
ESG	0,885	0,118	0,851	0,666

Sumber: Hasil Reability dan Validity Output SmartPLS

Nilai Cronbach's Alpa menunjukkan konsistensi internal dari indikator dalam mengukur konstruk. Nilai 0,885 menunjukkan bahwa reliabilitas internalnya sangat baik, karena berada di atas batas minimum yang umumnya digunakan (0,7). Nilai Composite Reliability mengindikasikan keandalan gabungan dari indikator dalam mengukur konstruk. Dengan nilai 0,851, ini menunjukkan reliabilitas yang baik karena berada di atas 0,7. Nilai AVE menunjukkan validitas konvergen, yaitu sejauh mana indikator mampu menjelaskan varians konstruknya. Nilai 0,666 lebih tinggi dari ambang batas minimum 0,5, sehingga menunjukkan validitas konvergen yang baik (Hair et al., 2017).

2) Test of struktural model atau inner model

a. R Square

Tabel 4. R Square

	R-square	R-Square Adjusted
Agresivitas Pajak	0.088	0.079

Sumber: Hasil R Square Output SmartPLS

Nilai R-Square (0,088) menunjukkan bahwa *Environmental Social Governance* (ESG) dengan moderasi koneksi politik hanya menjelaskan 8,8% variabilitas dalam agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti pengaruh ESG dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak relatif kecil (Hair et al., 2017).

b. The goodness Fit Test

Tabel 5. Model Fit

	Estimated Model
SRMR	0.091
d_ULS	0,087
d_G	0.055

Sumber: Hasil goodness Fit Test Output SmartPLS

SRMR adalah ukuran kesesuaian model. Nilai di bawah 0,08 menunjukkan model yang baik, tetapi nilai 0,091 mendekati ambang batas, menunjukkan bahwa model hampir sesuai. Nilai d_ULS dan d_G yang rendah menunjukkan bahwa model yang diuji cukup sesuai dengan data yang digunakan. Hal ini karena semakin rendah nilainya semakin baik (Hair et al., 2017).

Uji Hipotesis

Path coefficients yaitu pengujian hipotesis yang dapat dilihat dari nilai t-statistic dan nilai probabilitas. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6. *Path Coefficient Bootstrapping*

	Originilas Sample	T statistics	P Value
Environmental Social Governance -> Agresivitas pajak	0,092	1.155	0,248
Koneksi Politik x *Environmental Social Governance* -> Agresivitas pajak	-0,586	1,743	0,081

Sumber: Hasil *Path Coefficient Bootstrapping Output SmartPLS*

H_1: Hubungan *Environmental social Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan *Environmental social Governance* terhadap Agresivitas pajak tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka positif serta t statistics dibawah 1,966 yakni 1,155 dan p value diatas 0,05 yakni sebesar 0,248. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1 ditolak**

H_2: Koneksi Politik sebagai Moderasi *Environmental social Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi Politik sebagai moderasi *Environmental social Governance* terhadap agresivitas pajak tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka negatif serta t statistics 1,743 dibawah 1,966 dan p value diatas 0,05 yaitu sebesar 0,081. Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa H2 ditolak.

Uji Matrik ESG

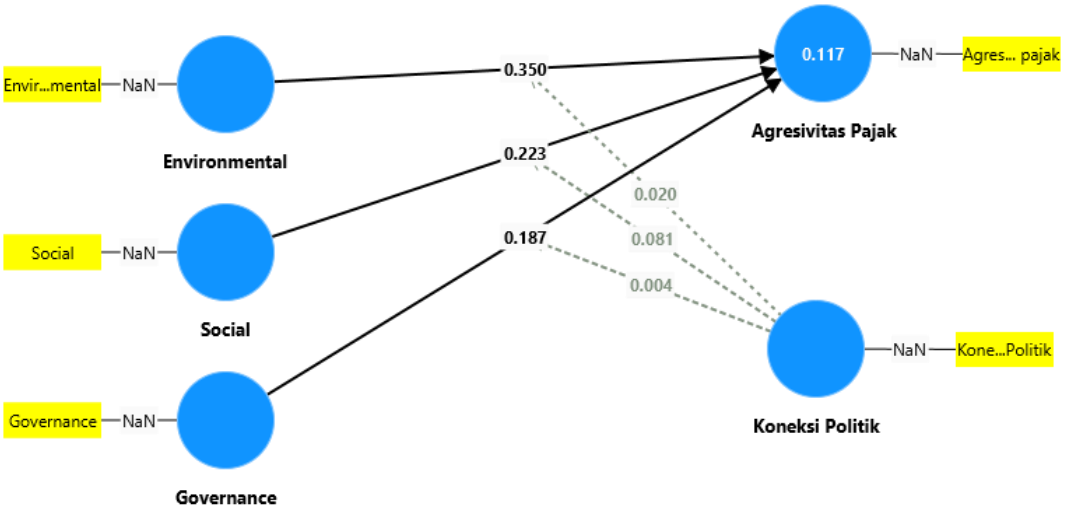

Gambar 2. Hasil Output Smart pls

1) *Evaluation Of Measrement Model test or Outer Model*

Tabel 7. Reability & Validity

	cronbach's alpha	composite reability (rho_a)	Composite Reabiility rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Environmental Social Governance	1,000	1,000	1,000	1,000
Koneksi Politik	1,000	1,000	1,000	1,000
Agresivitas Pajak	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Hasil *Reabilitty & Validity Output SmartPLS*

Hasil uji ini memiliki interpretasi bahwa perhitungan atas semua variabel bernilai 1,00 dengan interpretasi bahwa masing masing variabel diformulasikan menggunakan perhitungan satu indikator saja.

2) *Test of The Stuctural Model atau Inner Model*

a. R Square

Tabel 8. R Square

	R-square	R-Square Adjusted
Agresivitas Pajak	0,117	0,095

Sumber: Hasil R Square *Output SmartPLS*

Hasil uji R-square menunjukan bahwa variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependent bernilai 0,117. Hal ini memberikan arti bahwa variabel independen (*environmental social governance*) dengan peran moderasi koneksi politik mampu menjelaskan 11,7% dari variasi pada variabel dependen (Agresivitas Pajak). Sisa dari jumlah tersebut yakni sebesar 88,3% mampu dijelaskan oleh faktor faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian (Hair et al., 2017).

b. The goodness Fit Test

Tabel 9. Model Fit

	Estimated Model
SRMR	0,040
d_ULS	0,024
d_G	0,005
Chi-square	8,898
NFI	0,984

Sumber: Hasil goodness Fit Test Output SmartPLS

Hasil dari uji ini memberikan kesimpulan bahwa model dinyatakan layak dengan hasil SRMR senilai 0,040. Dengan nilai tersebut menunjukkan kecocokan sangat baik dalam memperkuat validitas model struktural yang digunakan. Nilai d_ULS dan d_G menunjukkan model fit yang baik karena semakin kecil nilainya semakin baik kecocokan model. Nilai chi square rendah dan NFI tinggi (0,984 > 0,90) menunjukkan model yang mendekati kecocokan sempurna. Dengan demikian, model dalam penelitian ini mampu memenuhi kriteria global fit dan validitas (Hair et al., 2017).

3) Uji Hipotesis

Tabel 10. *Path Coefficient Bootstrapping*

	Originilas Sample	T statistics	P Value
Environmental -> Agresivitas Pajak	0,112	0,935	0,350
Social -> Agresivitas Pajak	0,137	1,218	0,223
Tata Kelola -> Agresivitas Pajak	-0,197	1,319	0,187
Koneksi Politik x *Environmental* -> Agresivitas Pajak	-0,533	2,330	0,020
Koneksi Politik x *Social* -> Agresivitas Pajak	-0,467	1,745	0,081
Koneksi Politik x *Governance* -> Agresivitas Pajak	0,623	2,906	0,004

Sumber: Hasil *Path Coefficient Bootstrapping Output SmartPLS*

H_{1a} : Hubungan *Environmental* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan *Environmental* terhadap Agresivitas pajak tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka positif serta t statistics dibawah 1,966 yakni 0,935 dan

p value diatas 0,05 yakni sebesar 0,350. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1a ditolak.**

H_{1b} : Hubungan *Social* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan *social* terhadap Agresivitas tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka positif serta t statistics dibawah 1,966 yakni 1,218 dan p value diatas 0,05 yakni sebesar 0,223. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1b ditolak.**

H_{1c} : Hubungan *Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan *Governance* terhadap agresivitas pajak tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka negatif serta t statistics dibawah 1,966 yakni 1,319 dan p value diatas 0,05 yakni sebesar 0,187. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1c ditolak**

H_{2a} : Koneksi Politik sebagai Moderasi *Environmental* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan Koneksi Politik sebagai moderasi *environmental* terhadap agresivitas pajak berpengaruh negatif dengan *original sample* berada diangka negatif serta t statistics 2,330 diatas 1,966 dan p value dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,020. Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa **H2a diterima**

H_{2b} : Koneksi Politik sebagai moderasi sosial terhadap agresivitas pajak

Hubungan Koneksi Politik sebagai moderasi sosial terhadap agresivitas pajak tidak signifikan dengan *original sample* berada diangka negatif serta t statistics 1,745 dibawah 1,966 dan p value diatas 0,05 yaitu sebesar 0,081. Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa **H2b ditolak.**

H_{2c} : Koneksi Politik sebagai Moderasi *Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan koneksi politik sebagai moderasi *governance* terhadap agresivitas pajak berpengaruh positif dengan *original sample* berada diangka positif serta t statistics 2,906 diatas 1,966 dan p value dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,004. Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa **H2c diterima**.

Pembahasan

***Environmental social Governance* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian memberikan arah tidak signifikan pada ESG dengan agresivitas pajak sehingga dampak bahwa semakin tinggi ESG tidak ada keterkaitan pelaksanaan strategi agresivitas pajak. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja berorientasi pada keberlanjutan dengan mengutamakan perhatian terhadap *environmental social governance* dapat menjadi daya tarik untuk memperoleh simpati dari publik maupun masyarakat. Pandangan positif dari

pihak eksternal terhadap perusahaan akan tetap terjaga dengan tidak menerapkan kebijakan yang agresif dalam pengurangan beban fiskal perusahaan. Perilaku semacam ini dinilai tidak etis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Akibatnya, secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Jadi, secara tidak langsung akan memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan terhadap jalannya operasional perusahaan (Migang, 2022).

Hasil penemuan path coefficient t stattistic 1,155 dan p-value 0,248 menunjukan bahwa hubungan antara ESG dengan agresivitas pajak adalah tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mendukung teori legitimasi, yang menjelaskan bahwa kepentingan perusahaan dalam menerapkan kerangka kerja berbasis ESG terutama bidang sosial dapat memicu pandangan positif dari publik, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Sebaliknya, tindakan yang tidak etis, seperti menerapkan strategi pajak yang melanggar norma, dapat merusak citra perusahaan. Hasil ini memiliki persamaan penemuan bahwa ESG secara tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh (Shafanur & Ratnasari, 2023). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat ESG tinggi biasanya enggan menerapkan strategi pajak yang lebih agresif.

Environmental Tidak Signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memberikan arah tidak signifikan pada dimensi ESG dalam kategori *environmental* dengan agresivitas pajak sehingga dampak bahwa semakin tinggi *environmental* tidak ada keterkaitan pelaksanaan strategi agresivitas pajak. Dengan demikian, penggunaan kerangka kerja berbasis keberlanjutan dengan mementingkan kepedulian lingkungan mampu dijadikan magnet untuk menarik simpati dari publik maupun masyarakat. Citra positif dari pihak luar kepada perusahaan akan terkendali dengan tidak melaksanakan kebijakan yang masif dalam penurunan biaya fiskal perusahaan. Hal ini dianggap tidak etis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi, secara tidak langsung akan memengaruhi keputusan pemangku kepentingan untuk berkontribusi terhadap operasional perusahaan (Migang, 2022).

Hasil penemuan *path coefficient* t stattistic 0,935 dan p-value 0,350 menunjukan bahwa hubungan antara ESG dalam dimensi *environmental* dengan agresivitas pajak adalah tidak signifikan secara statistik. hasil ini mendukung teori legistimasi bahwa kepentingan perusahan dengan menjalankan kerangka kerja berbasis ESG terutama bidang kelingkungan dapat memicu adanya pandangan positif oleh publik yang sangat bermanfaat untuk menjaga

keberlanjutan operasional perusahaan sehingga dengan melaksanakan tidakan yang tidak beretika seperti melaksanakan strategi pajak perusahaan dengan menerobos norma akan merusak citra mereka. Hasil ini memiliki persamaan penemuan bahwa ESG secara tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh (Shafanur & Ratnasari, 2023). Dengan demikian, ESG tinggi cenderung tidak menggunakan strategi pajak yang lebih agresif.

Social Tidak Signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memberikan arah tidak signifikan pada dimensi ESG dalam kategori *social* dengan agresivitas pajak sehingga dampak bahwa semakin tinggi ESG dibidang *social* tidak ada keterkaitan pelaksanaan strategi agresivitas pajak. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja berorientasi pada keberlanjutan dengan mengutamakan perhatian terhadap aspek sosial dapat menjadi daya tarik untuk memperoleh simpati dari publik maupun masyarakat. Pandangan positif dari pihak eksternal terhadap perusahaan akan tetap terjaga dengan tidak menerapkan kebijakan yang agresif dalam pengurangan beban fiskal perusahaan. Perilaku semacam ini dinilai tidak etis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Akibatnya, secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Jadi, secara tidak langsung akan memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan terhadap jalannya operasional perusahaan (Migang, 2022).

Hasil penemuan *path coefficient* t stattistic 1,218 dan p-value 0,223 menunjukan bahwa hubungan antara ESG dalam dimensi sosial dengan agresivitas pajak adalah tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mendukung teori legitimasi, yang menjelaskan bahwa kepentingan perusahaan dalam menerapkan kerangka kerja berbasis ESG terutama bidang sosial dapat memicu pandangan positif dari publik, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Sebaliknya, tindakan yang tidak etis, seperti menerapkan strategi pajak yang melanggar norma, dapat merusak citra perusahaan. Hasil ini memiliki persamaan penemuan bahwa ESG secara tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh (Shafanur & Ratnasari, 2023). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat ESG tinggi biasanya enggan menerapkan strategi pajak yang lebih agresif.

Governance tidak Signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memberikan arah tidak signifikan pada dimensi ESG dalam kategori *governance* dengan agresivitas pajak sehingga dampak bahwa semakin tinggi ESG dibidang *governance* tidak ada keterkaitan pelaksanaan strategi agresivitas pajak. Oleh sebab itu,

implementasi kerangka kerja yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dengan memberikan prioritas pada aspek tata kelola dapat berfungsi sebagai daya tarik untuk meraih perhatian dan dukungan dari masyarakat maupun publik. Reputasi baik perusahaan di mata pihak eksternal dapat dipertahankan dengan tidak mengadopsi kebijakan yang berlebihan dalam menekan biaya fiskal perusahaan. Tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mendukung operasional perusahaan (Migang, 2022).

Hasil penemuan *path coefficient* t stattistic 1,319 dan p-value diatas 0,187 menunjukan bahwa hubungan antara ESG dalam dimensi tata kelola dengan agresivitas pajak adalah tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menguatkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa kepentingan perusahaan dalam mengadopsi kerangka kerja berbasis ESG terutama bidang tata kelola dapat menciptakan persepsi positif dari publik, yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan. Sebaliknya, tindakan tidak etis, seperti menerapkan strategi pajak yang melanggar norma, dapat merusak reputasi perusahaan. Hasil ini memiliki persamaan penemuan bahwa ESG secara tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh (Shafanur & Ratnasari, 2023). Oleh karena itu, perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung menghindari penerapan strategi pajak yang lebih agresif.

Koneksi Politik sebagai Moderasi *Environmental Social Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil analisis mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara ESG secara keseluruhan dengan agresivitas pajak. Hal ini terbukti dari nilai *path coefficient* yang lebih rendah dari 1,966 untuk t statistics dan lebih tinggi dari 0,05 untuk p value. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penerapan strategi ESG dan pengurangan pajak yang besar, karena reputasi positif yang diperoleh perusahaan dari pihak eksternal tetap terjaga meskipun tanpa kebijakan pengurangan pajak yang berlebihan. Kebijakan seperti ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip etika dalam manajemen keuangan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan teori stakeholder, yang menyatakan bahwa keputusan pemangku kepentingan dapat terpengaruh secara tidak langsung untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan (Nurlaely, 2023).

Hasil ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik berpotensi sebagai faktor moderasi. Hal ini terlihat dari ketidaksignifikanan koneksi politik (M) dalam memoderasi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), serta ketidakterpengaruhannya

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Solimun, 2017).

Koneksi Politik Dapat Memoderasi Secara Negatif Hubungan Lingkungan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian ditemukan bahwasannya koneksi politik memperkuat pengaruh kebijakan perusahan ke arah lingkungan dalam mengurangi agresivitas pajak. Hal ini memiliki makna bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memanfaatkan koneksi politik untuk meningkatkan legistimasi dan reputasi perusahaan sehingga lebih cenderung mengurangi agresivitas pajak untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, koneksi politik dapat digunakan untuk memperkuat komitmen perusahaan terhadap penekanan agresivitas pajak dengan aplikasi kebijakan yang berbasis lingkungan untuk peningkatan citra positif di mata regulator dan masyarakat (Agustini et al., 2023).

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik ketika didukung oleh koneksi politik cenderung lebih patuh pada kewajiban pajak. Hal ini mencerminkan bahwa koneksi politik dapat digunakan secara positif untuk memperkuat dampak ESG dalam mengurangi agresivitas pajak khususnya pada dimensi lingkungan. Jadi, dengan kinerja lingkungan yang baik perusahaan lebih berfokus pada kepatuhan pajak untuk meningkatkan citra sebagai entitas yang bertanggungjawab secara lingkungan (Yoon et al., 2021). Secara keseluruhan, hasil ini selaras dari teori *legistimasi* yang melandasi hubungan variabel moderasi dalam penelitian ini yang berartikan bahwa dedikasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dapat membangun reputasi positif perusahaan di mata umum (Widuri et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik termasuk dalam klasifikasi moderasi semu. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi variabel koneksi politik (M) dalam memoderasi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Namun, variabel koneksi politik (M) tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel dependen (Y) (Solimun, 2017).

Koneksi Politik Memoderasi Hubungan Sosial terhadap Agresivitas Pajak

Hasil dari pengujian ditemukan bahwa koneksi politik tidak signifikan memoderasi hubungan tanggung jawab sosial terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian path coefficient yang bernilai dibawah 1,966 untuk t statistics dan diatas 0,05 untuk pengujian p value. Dengan demikian, mampu di interpretasikan bahwa tidak ada korelasi dengan Penerapan strategi ESG dengan tindakan pengurangan pajak secara massif karena

reputasi positif dari pihak eksternal terhadap perusahaan akan tetap terjaga dengan tidak menerapkan kebijakan yang berlebihan dalam pengurangan biaya fiskal perusahaan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan etika dalam manajemen keuangan perusahaan. Hasil ini berkorelasi dengan teori stakeholder yang memiliki arti secara tidak langsung keseluruhan dapat memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan (Nurlaely, 2023).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peran koneksi politik termasuk dalam kategori moderasi potensial. Hal ini terlihat dari tidak signifikan-nya variabel koneksi politik (M) dalam memoderasi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), serta variabel independen (X) yang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)(Solimun, 2017).

Koneksi Politik Dapat Memoderasi Secara Positif Hubungan Tata Kelola terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian ditemukan bahwa semakin tinggi koneksi politik maka semakin tinggi agresivitas pajak meskipun memiliki penerapan tata kelola yang baik. Penemuan hasil antara koneksi politik dan agresivitas pajak serta perannya dalam memoderasi hubungan variabel dependen dengan variabel independen memiliki perbedaan hasil dari penelitian dari (Kim & Lee, 2021). Hasil ini selaras dari teori *political cost hypotesis* yang melandasi hubungan variabel moderasi dalam penelitian ini yang berarti hipotesis biaya politik menawarkan arahan untuk menghindari kemungkinan intervensi seperti peningkatan tarif pajak, aturan yang lebih ketat, dan penalty (Puspita, 2024).

Hasil positif diperoleh dalam pengujian yaitu koneksi politik sebagai moderasi proksi ESG di dibidang tata kelola terhadap agresivitas pajak yang memberikan stereotype bahwasannya kemungkinan bahwa penerapan tata kelola yang baik tetapi memiliki koneksi politik kuat dapat tetap agresif dalam perpajakan karena koneksi politik memberikan perlindungan atau mengurangi risiko pengawasan dan regulator (Satiti et al., 2021). Dengan demikian, koneksi politik dapat mengaburkan tujuan tata kelola yang baik karena perusahaan mungkin tetap memprioritaskan efisiensi pajak melalui agresivitas pajak meskipun memiliki struktur tata kelola yang baik. Disamping itu, koneksi politik dapat memoderasi hubungan ESG dan agresivitas pajak karena memperkuat perilaku oportunistik dan melemahkan prinsip tata kelola yang baik. Akibatnya, koneksi politik cenderung meningkatkan agresivitas pajak daripada mendukung penerapan ESG secara efektif.

Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa peran koneksi politik termasuk dalam

kategori moderasi semu. Hal ini terlihat dari signifikansi variabel koneksi politik (M) dalam memoderasi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Namun, variabel koneksi politik (M) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Solimun, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur, tambang, dan agro yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, kesimpulan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, yaitu *Environmental Social Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ditolak karena beberapa alasan. Pertama, H1a yang menyatakan bahwa *Environmental* berpengaruh terhadap agresivitas pajak tidak signifikan karena hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* di atas 0,005 dan statistik *t* di bawah 1,966. Kedua, H1b yang menyatakan bahwa *Social* berpengaruh terhadap agresivitas pajak juga tidak signifikan dengan alasan serupa, yaitu nilai *p-value* di atas 0,005 dan statistik *t* di bawah 1,966. Ketiga, H1c yang menyatakan bahwa *Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak tidak signifikan karena hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* di atas 0,005 dan statistik *t* di bawah 1,966.

Hipotesis kedua, yaitu koneksi politik dapat memoderasi *Environmental Social Governance* terhadap agresivitas pajak, diterima dengan beberapa alasan. Pertama, H2a yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat memoderasi *Environmental* terhadap agresivitas pajak secara signifikan dengan korelasi negatif, didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan nilai *original sample* negatif, *p-value* di bawah 0,005 sebesar 0,020, dan statistik *t* di atas 1,966 sebesar 2,330. Kedua, H2b yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat memoderasi *Social* terhadap agresivitas pajak secara tidak signifikan, didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan nilai *p-value* di atas 0,05 sebesar 0,081 dan statistik *t* di bawah 1,966 sebesar 1,745. Ketiga, H2c yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat memoderasi *Governance* terhadap agresivitas pajak secara signifikan dengan korelasi positif, didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan nilai *p-value* di bawah 0,05 sebesar 0,004 dan statistik *t* di atas 1,966 sebesar 2,906.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan sampel selama tiga periode dalam pengukuran, yaitu 2021-2023. Kedua, penelitian hanya berfokus pada satu variabel moderasi, yaitu koneksi politik, sebagai penguat hubungan antarvariabel. Ketiga, penelitian hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu *Environmental Social Governance*, dalam kaitannya dengan dugaan agresivitas pajak.

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengelola pajak secara efektif tanpa melanggar norma yang berlaku serta tetap menjaga citra perusahaan di mata publik dengan mengaplikasikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk memperhatikan etika dalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan jaringan atau kedekatan dengan pemerintah untuk kepentingan yang baik, serta tetap menjaga integritas dalam menaati peraturan perpajakan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menghadirkan lebih dari satu variabel moderasi guna menemukan faktor yang lebih kuat dalam hubungan antara variabel dependen dan independen. Selain itu, guna memperoleh gambaran yang lebih akurat dan memahami tren jangka panjang, disarankan agar penelitian mendatang menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

REFERENSI

Agustini, Y., Azwardi, & Mukhtaruddin. (2023). Pengaruh environment, social, and governance, dan financial distress terhadap tax aggressiveness di Indonesia: CEO gender sebagai variabel moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 5*, 920–926. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.670

Anggraeni, U. S., & Palupi, A. (2023). CRS' dimensions: Economic, social, and environmental on tax aggressiveness. *International Journal of Business, Economics and Law, 30(1)*, 1.

Annur, C. M. (2023). Pertumbuhan penerimaan pajak RI melambat pada semester I 2023, ini penyebabnya. *Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/pertumbuhan-penerimaan-pajak-ri-melambat-pada-semester-i-2023-ini-penyebabnya

Arsalan Khan, M., & Tjaraka, H. (2024). Tax aggressiveness in Indonesia: Insights from CSR, financial dynamics, and governance. *International Journal of Current Science Research and Review, 07(05)*, 2404–2415. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i5-01

Asmara, A. C., & Helmy, H. (2023). Pengaruh koneksi politik dan keragaman gender terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3)*, 1153–1167. https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.804

Aulia, E. Z., & Alvia, L. (2024). The effect of profit behavior and tax aggressiveness after the implementation of PSAK 73: Literature review. *International Journal of Business and Applied Economics, 3(2)*, 223–230. https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i2.8330

Carolina, V., & Tjahyadi, S. (2024). Political connections and tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, 16(1)*, 158–167. https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8318

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review, 94(2)*, 179–203. https://doi.org/10.2308/accr-52198

Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, 13(2)*, 332–343.

Faradita, M. P., & Kurniawan, R. (2024). Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance terhadap agresivitas pajak. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 4(1)*, 207–216.

Farhan, M. (2024). Keseimbangan risiko dan imbal hasil dalam strategi investasi berkelanjutan: Pendekatan integratif terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2)*, 243–264. https://doi.org/10.32806/p53yhw31

Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(3)*, 1601–1624.

Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage.

Kartika, F., Dermawan, A., & Hudaya, F. (2023). Pengungkapan environmental, social, governance (ESG) dalam meningkatkan nilai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora, 9(1)*, 29–39. https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.14014

Kim, J., & Lee, J. (2021). How CEO political connections induce corporate social irresponsibility: An empirical study of tax avoidance in South Korea.

Li, X., Li, W., & Zhang, Y. (2020). Family control, political connection, and corporate green governance.

Migang, S. (2022). Pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal GeoEkonomi, 13(1)*, 103–115. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.196

Nurlaely, H. (2023). Pengaruh pengungkapan corporate governance, environmental social governance, environmental uncertainty dan corporate reputation terhadap tax avoidance.

Puspita, M. G. (2024). Pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan dan CSR terhadap agresivitas pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. *Jurnalku, 4(2)*, 179–185. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.796

Ridwansyah, & Indayani. (2024). The effect of profitability, debt policy, political connections, economic crisis on tax aggressiveness. *Ejournal.Ipinternasional.Com, 6(2)*, 91–100. https://doi.org/10.55299/ijec.v3i1.718

Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The effects of earning management and environmental, social, governance (ESG) on tax avoidance with leverage as a moderating variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy, 3(1)*, 63–74. https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.63-74

Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political connections and tax aggressiveness: The role of gender diversity as a moderating variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 21(2),* 273–292. https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794

Shafanur, G. N., & Ratnasari, M. (2023). The effect of CSR and ESG disclosure on tax avoidance with financial performance as a moderation. *Atlantis Press International BV.* https://doi.org/10.2991/978-94-6463-348-1_3

Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2),* 270–283. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521

Solimun. (2017). *Metode statistika multivariat pemodelan persamaan struktural (SEM) pendekatan warpPLS.* Universitas Brawijaya Press.

Theodora, A. (2024). Gol "hattrick" pajak dan rasio yang "tengkes." *Kompas.Id.* https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/04/di-balik-gol-hattrick-kinerja-pajak

Widuri, R., Subroto, B., Saraswati, E., & Rusydi, M. K. (2024). Meta-analysis of the relationship between corporate social responsibility and tax aggressiveness. *Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(5),* 1–21. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-139

Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The effect of ESG performance on tax avoidance—Evidence from Korea. *Sustainability, 13(12),* 1–16. https://doi.org/10.3390/su13126729